

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dian Tri. 2014. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 3 (2014)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Carnegie dan West. (2005). Making Accounting Accountable in the Public Sector. *Critical Perspective on Accounting* (vol.16), pp.905-928.
- Fontanella, Amy & Hilda Rossieta. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Padang & Universitas Indonesia*.
- Fredy Situngkir, Sirojuzilam, Erlina & Agus Suriadi. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi, Vol 17, No 3, Juli 2014. Alumni PWD SPs USU/BPS Sumatera Utara & Dosen PWD SPs USU*.
- Maryanti, Elda Sofia. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Semarang. *Badan Penerbit UNDIP*.
- Giannoni, M dan Hitiris, T. 2002. The Regional Impact of Health Care Expenditure: The Case of Italy. *Applied Economics Letters*, 14.
- Haska, Intan Permata. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi STIE MDP*
- Liu, Chih hung (2007). What Type of Fiscal Decentralization System has better Performance. *School of Public Policy*.
- Mimba, N.S.H, *et al* (2007) Public Sector Performance Measurement in Developing Countries, *Journal Of Accounting and Organizational Change* Vol3.No.3p.192 198.
- Moisiu, Alexander (2013). Decentralizations and The Increased autonomy in Local Governments, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, pp.459-463

Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rinaldi, Taufik, Marini Purnomo dan Dewi Damayanti (2007) Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi : Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah, Bank Dunia L Justice for the poor Project.

Saputra, Bambang (2012), Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Korupsi di Indonesia, Jurnal Borneo Administrator.

Syahrudin. 2006. Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi Yang Konsisten.

<http://www.djpk.depken.go.id/>. Departemen Keuangan